



**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

RENCANA KERJA TAHUN 2018



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : P. 12/P2SDM/SET/REN.0/10/2017

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2018, serta penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nomor P.5/SETBP2SDM/2015, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2018 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program

Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2018 ini menjadi pedoman dan dasar bagi seluruh unit kerja di lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2017

KEPALA BADAN,



Ir. HELMI BASALAMAH, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lampiran Peraturan Kepala Badan P2SDM

Nomor : P.12/P2SDM/SET/REN.0/10/2017

RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2018



PENGANTAR

KEPALA BADAN P2SDM

Rencana Kerja BP2SDM Tahun 2018 didasarkan pada dokumen Renja KLHK Tahun 2018 serta telah disusun sebelumnya menggunakan sistem aplikasi e-planning KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Paradigma dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran ke depan tidak lagi menganut *money follow function* akan tetapi *money follow program*, artinya penggunaan anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial.

Sebagai institusi pendukung, Badan P2SDM harus dapat mendukung Eselon I lain di lingkup KLHK. Kita jangan hanya terpaku pada aktifitas harian yang rutin saja, tapi juga harus dapat berfikir "*Out of The Box*" untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Prioritas Nasional merupakan poin penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 harus dapat mendukung pencapaian prioritas nasional.

Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita semua untuk selalu memenuhi kinerja sesuai yang diharapkan. Selamat bekerja, dan tanamkan selalu sikap integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Kepala Badan P2SDM,



Ir. Helmi Basalamah, MM



DAFTAR ISI

	Hal
Peraturan Kepala Badan P2SDM	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi SDM	2
II. Capaian Sasaran Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	6
2.2 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017.....	14
III. Rencana Kerja Tahun 2018	19
3.1 Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2018	21
3.2 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018	22
IV. Penutup	26
V. Lampiran	27
Pustaka	42

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	3
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dan Staf Lingkup Badan P2SDM	4
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Golongan	4
Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 5. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM	6
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2016	7
Tabel 7. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016.....	8
Tabel 8. Prioritas Nasional BP2SDM Tahun 2018	9
Tabel 9. Indikator kinerja kegiatan per satuan kerja Badan P2SDM Tahun 2017.....	10
Tabel 10. Capaian IKP BP2SDM hingga bulan September 2017	12
Tabel 11. Capaian IKK BP2SDM hingga bulan September 2017	12
Tabel 12. Perubahan Pagu Anggaran APBN dan APBN-P Per Kegiatan Badan P2SDM Tahun 2016.	14
Tabel 13. Pagu Anggaran dan <i>Self Blocking</i> Badan P2SDM Tahun 2016	15
Tabel 14. Realisasi Anggaran Per Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2016.....	15
Tabel 15. Realisasi Keuangan Per Output Kegiatan Tahun 2016 pada Satker Pusat lingkup Badan P2SDM	16
Tabel 16. Distribusi alokasi anggaran APBN per masing – masing satker lingkup BP2SDM	17
Tabel 17. Alokasi anggaran APBN-P per masing – masing satker lingkup BP2SDM	18
Tabel 18. Capaian anggaran Badan P2SDM hingga 9 Oktober 2017	19
Tabel 19. Prognosis satuan kerja lingkup Badan P2SDM hingga Desember 2017.....	19
Tabel 20. Prioritas Nasional Badan P2SDM Tahun 2018.....	22
Tabel 21. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM	23
Tabel 22. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2018	24
Tabel 23. Alokasi anggaran Badan P2SDM berdasarkan jenis belanja dan sumber dana (dalam ribuan rupiah)	25
Tabel 24. Distribusi alokasi anggaran per masing – masing satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM (dalam ribuan rupiah).....	25

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) Tahun 2018 merupakan penjabaran kegiatan Tahun 2018 dan tindak lanjut pelaksanaan kinerja dan capaian target sesuai arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan Renstra BP2SDM Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Renja BP2SDM Tahun 2018 ini disusun dengan menggunakan prinsip *money follow program* dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial sesuai dengan arahan Presiden RI. Pelaksanaan prinsip *money follows program* memerlukan adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Penggunaan anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

Pada Tahun 2018 ini, terdapat penajaman pada Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang disusun. Saat ini, terdapat 10 PN dan 30 PP. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 PN dijabarkan lebih rinci ke dalam PP dan Kegiatan Prioritas (KP). Selanjutnya KP tersebut akan dirinci lebih lanjut pada Proyek K/L.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bertanggung jawab pada 9 PN. Badan P2SDM mempunyai 4 kegiatan atau indikator kinerja kegiatan yang termasuk dalam pencapaian sasaran dari 3 PN, 4 PP, dan dijabarkan dalam 4 Proyek K/L.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Badan P2SDM Tahun 2018 adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM untuk mewujudkan target-target Tahun 2018. Dokumen Renja ini terdiri dari Peraturan Kepala Badan, Pengantar, Pendahuluan, Capaian Sasaran Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Penutup dan Lampiran.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Tugas Badan P2SDM adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Badan P2SDM memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standarisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standarisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standarisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, struktur organisasi Badan P2SDM seperti yang tercantum pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung pula oleh 5 unit kerja eselon II meliputi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Pusat Penyuluhan dan Sekretariat Badan. Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 12 UPT yang terdiri dari 7 Balai Diklat LHK dan 5 SMK Kehutanan Negeri.

Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No	Unit Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
A. Pusat			
1.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	
3.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Serpong	
4.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	
B. UPT Balai Diklat LHK (PerMenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)			
1.	Balai Diklat LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta; Banten; Lampung; Kalimantan Barat; Bangka Belitung.
2.	Balai Diklat LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Diklat LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Diklat LHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7.	Balai Diklat LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
C. SMK Kehutanan Negeri (PerMenLHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)			
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

Jumlah Pegawai Badan P2SDM secara keseluruhan sebanyak 1.033 orang PNS dan 349 orang tenaga kontrak yang tersebar di unit kerja Pusat dan UPT sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dan Staf Lingkup Badan P2SDM

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	5
3.	Eselon III	
	- Pusat	18
	- UPT (Balai Diklat LHK)	7
4.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan	5
5.	Eselon IV	
	- Pusat	44
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	26
6.	Staf PNS	
	- Pusat	245
	- UPT (Balai Diklat LHK) dan SMKK Negeri	682
	Jumlah PNS (1-6)	1.033
7.	Tenaga Kontrak	349
	Total Pegawai (1-7)	1.382

SDM yang merupakan PNS pada Badan P2SDM terdiri dari personil pada satker pusat sebanyak 245 orang dan pada satker di UPT sebanyak 682 orang atau secara total sebanyak 1.033 orang. Rincian tenaga PNS berdasarkan golongan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	Golongan IV	56	71	25	25	172
2	Golongan III	95	251	92	138	592
3	Golongan II	29	163	16	47	264
4	Golongan I	0	22	0	3	28
	Jumlah	180	507	133	213	1.033

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran pegawai Badan P2SDM baik pada Satuan Kerja Pusat maupun UPT sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	S3	10	10	6	3	29
2	S2	57	79	20	31	187
3	S1/D4	52	153	69	84	358
4	D3	10	20	20	19	69
5	SLTA/D1/D2	44	199	15	70	328
6	SLTP	4	28	1	3	36
7	SD	3	18	2	3	26
Jumlah		180	507	133	213	1.033



II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

2.1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016

Program kerja Badan P2SDM sesuai Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019 adalah Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sasaran dari penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyelenggaraan Program tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui 5 (lima) butir kegiatan utama dan 1 (satu) butir kegiatan dukungan manajemen, atau secara terperinci yaitu: Perencanaan dan Pengembangan SDM; Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK; Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan; Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan; Peningkatan Penyuluhan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Pada Tahun 2016, terdapat 4 (empat) target indikator kinerja program yang dijabarkan melalui 17 indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Tabel 5 dan 6 berikut.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2015-2019	Target 2016
Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	5.500 Unit KTH	472 Unit KTH
Jumlah Tenaga Bakti Rimawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, Dan SDM LHK Kompeten, 25.400 orang.	25.400 Orang	1.100 Orang
Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya, 57.640 orang.	57.640 Orang	4.675 orang
Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya, 71.200 Orang, dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	71.200 Orang	3.900 orang
	5.000 Unit Sekolah/Kampus	700 Unit Sekolah/Kampus

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2016

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<p>Peningkatan Penyuluhan</p> <p>Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i></p>	<p>a) Jumlah Kelas Kelompok Tani Desa-Desa Hutan dari Tingkatan Pemula ke Madya, 450 KTH</p> <p>b) Jumlah Koperasi KTH yang Dibentuk, 22 unit</p> <p>c) Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 15 unit</p> <p>d) Jumlah Tenaga Pendamping Handal Bagi KTH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-Desa Hutan, 450 orang</p>
<p>Perencanaan dan Pengembangan SDM</p> <p>Sasaran: <i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten</i></p>	<p>a) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengelola KPH, 600 orang</p> <p>b) Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya 500 orang</p>
<p>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK</p> <p>Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i></p>	<p>a) Jumlah Kapasitas SDM Aparatur LHK Yang Meningkatkan Kapasitasnya 2.885 Orang</p> <p>b) Jumlah SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa (S2 dan S3), 40 orang</p> <p>c) Jumlah KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan, 2 unit KHDTK</p> <p>d) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan yang Meningkatkan Kapasitasnya, 600 orang</p> <p>e) Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Hutan Meningkatkan Kapasitasnya, 450 orang</p>
<p>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</p> <p>Sasaran: <i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i></p>	<p>Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan sebanyak 700 orang</p>
<p>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</p> <p>Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan</i></p>	<p>a) Jumlah Kader Lingkungan Hidup Meningkatkan Kapasitasnya, 400 orang</p> <p>b) Jumlah Generasi Muda LH Meningkatkan Kapasitasnya, 1.000 orang</p> <p>c) Jumlah Sekolah/Kampus Yang Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) 700 Unit Sekolah/Kampus</p> <p>d) Jumlah Anggota Saka Kalpataru Peduli Dan Berbudaya LH, 2.500 orang</p>
<p>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</p> <p>Sasaran: <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i></p>	<p>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.</p>

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan P2SDM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran rata-rata kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2016 adalah sebesar 100,66%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan rata-rata kinerja tahun 2015 yaitu sebesar 92,97 % sehingga dapat disimpulkan kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2016 meningkat dan efektif. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016

Program	Sasaran	Target Indikator Kinerja Program (IKP) 2015 - 2019	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	% Capaian
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	1) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya 5.500 unit	472 Unit KTH	474 Unit KTH	100,42
		2) Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	1.100 orang	1.224 orang	111,27
		3) Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang	4.675 orang	4.652 orang	99,51
		4) Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus yang berbudaya lingkungan	3.900 orang 700 Unit Sekolah/ Kampus	3.198 orang 706 Unit Sekolah/ Kampus	82,00 100,86
Rata-rata Kinerja Badan P2SDM					100,66

2.1.2 Indikator Kinerja dan Prognosis Tahun 2017

Berdasarkan hasil RKP Tahun 2017, 11 kegiatan dari 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan P2SDM termasuk ke dalam 3 prioritas nasional (Tabel 8) yaitu:

1. Prioritas Nasional Revolusi Mental

Program Prioritas Nasional: **Peneguhan Jati Diri Dan Karakter Bangsa**

- Kegiatan Prioritas Nasional: Pendidikan Berbasis Karakter
- Kegiatan Prioritas Nasional: Lingkungan Satuan Pendidikan yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

2. Prioritas Nasional Antar Kelompok Pendapatan

Program Prioritas Nasional: **Perhatian Khusus Kepada Usaha Mikro dan Kecil**

- Kegiatan Prioritas Nasional: Koperasi dan Kemitraan Usaha
- Kegiatan Prioritas Nasional: Keterampilan Usaha

3. Prioritas Nasional Desa dan Kawasan Pedesaan

Program Prioritas Nasional: **Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan**

- Kegiatan Prioritas Nasional: Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA, Pengelolaan LH dan Teknologi Tepat Guna.

Tabel 8. Prioritas Nasional BP2SDM Tahun 2018

No.	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja
1. PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL		
Program Prioritas Nasional: Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa		
Kegiatan Prioritas Nasional: Pendidikan Berbasis Karakter		
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan
2.	Penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur SDM LHK	Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat
3.		Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya
4.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH
Program Prioritas Nasional : Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa		
Kegiatan Prioritas Nasional : Lingkungan Satuan Pendidikan yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan		

No.	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja
5.	Penyelenggaraan Pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan
2. PRIORITAS NASIONAL ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN		
Program Prioritas Nasional: Perhatian Khusus Kepada Usaha Mikro dan Kecil		
Kegiatan Prioritas Nasional: Koperasi dan Kemitraan Usaha		
1.	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah kelas kelompok tani hutan meningkat dari pemula ke madya melalui penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha
2.		Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk
Program Prioritas Nasional: Perhatian Khusus Kepada Usaha Mikro dan Kecil		
Kegiatan Prioritas Nasional: Keterampilan Usaha		
3.	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS).
3. PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PEDESAAN		
Program Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan Termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan		
Kegiatan Prioritas Nasional : Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA, Pengelolaan LH dan Teknologi Tepat guna		
1.	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah tenaga pendamping handal dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan
2.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan pengembangan generasi Lingkungan Hidup	Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih meningkat kapasitasnya
3.		Jumlah generasi/masyarakat di bidang teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilatih

Kinerja organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2017 dilihat dari capaian yang diukur melalui indikator kinerja kegiatan (output). Setiap satuan kerja Badan P2SDM memiliki indikator kinerja masing-masing, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Indikator kinerja kegiatan per satuan kerja Badan P2SDM Tahun 2017

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
Perencanaan Pengembangan SDM Sasaran: Tersedianya tenaga bakti rimbawan	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 210 orang (pembiayaan sebanyak 810 orang)*

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 500 orang
<p>Peningkatan Penyuluhan Sasaran: Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</p>	<p>a. Jumlah kelas kelompok tani hutan meningkat dari pemula ke madya melalui penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha 450 KTH</p> <p>b. Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk, 10 unit</p> <p>c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 10 unit</p> <p>d. Jumlah tenaga pendamping handal dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, 300 orang</p>
<p>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM LHK</p>	<p>a. Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat, 3.000 orang</p> <p>b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 85 orang</p> <p>c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 2 unit KHDTK</p> <p>d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 210 orang</p> <p>e. Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 300 orang</p>
<p>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</p>	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 436 orang
<p>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Sasaran: Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan hidup</p>	<p>a. Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih meningkat kapasitasnya, 600 orang</p> <p>b. Jumlah generasi/masyarakat di bidang teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilatih, 550 orang</p> <p>c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan, 500 unit sekolah/kampus</p> <p>d. Jumlah anggota saka kalpataru yang peduli dan berbudaya lingkungan, 1.000 orang</p>
<p>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</p>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 82,00 (A) di Tahun 2017.

Ket : * = Pembiayaan pada Tahun 2017 sebanyak 810 orang yang terdiri dari 210 orang rekrutmen baru dan 600 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan tahun ke-II (rekrutmen tahun 2016).

Hingga bulan September 2017 realisasi fisik kegiatan-kegiatan di Badan P2SDM dapat dilihat pada tabel 10 dan Tabel 11 berikut.

Tabel 10. Capaian IKP BP2SDM hingga bulan September 2017

Target IKP 2015-2019	Target 2017	Realisasi s/d September 2017	% Capaian
1. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak Dan SDM LHK Kompeten (25.400 orang).	710 orang	719 orang	101,27 %
2. Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya (57.640 orang).	4.031 orang	3.664 orang	90,90 %
3. Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya (71.200 orang) dan 5.000 unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	2.150 orang	2.300 orang	106,98 %
	500 unit	128 unit	25,60 %
4. Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya (5.500 unit KTH dan Koperasi).	460 unit	329 unit	71,52 %

Tabel 11. Capaian IKK BP2SDM hingga bulan September 2017

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi s.d September	% Capaian
1. Perencanaan Pengembangan SDM	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dlm mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten			
	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	210 orang	210 orang	100,00%
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkatkan kompetensinya, 10.400 orang	500 orang	509 orang	101,8 %
2. Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Meningkatnya kapasitas SDM LHK			
	a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur dan non Aparatur LHK yang meningkatkan kapasitasnya 35.000 orang	3.000 orang	2.671 orang	89,03%
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 340 orang	85 orang	54 orang	63,53%
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit	2 unit	0 unit	0,00%
	d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkatkan kapasitasnya, 15.000 org	210 orang	210 orang	100,00%
	e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkatkan kapasitasnya 5.000 orang	300 orang	300 orang	100 %
3. Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan			
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	436 orang	429 orang	98,39%

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi s.d September	% Capaian
4. Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan			
	a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang	600 orang	550 orang	91,67%
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang	550 orang	472 orang	85,82%
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus	500 unit	128 unit	25,60%
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang	1.000 orang	1.278 orang	127,8%
5. Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat			
	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	450 unit	319 unit KTH	70,89%
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit	10 unit	10 unit	100,00%
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit	10 Unit	9 unit	90,00%
	d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masy di desa – desa hutan, 5.000 orang	300 orang	277 orang	92,33%
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi			
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A)	82 Poin	72,09 Poin	87,91%

Dari hasil capaian pada tabel di atas, 7 (tujuh) kegiatan yang ada di Badan P2SDM sudah memenuhi target hingga 100%. Selain itu beberapa kegiatan lain juga sudah memenuhi capaian realisasi hingga 90% dari target yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, hingga Bulan Desember capaian IKK Badan P2SDM ditargetkan dapat dipenuhi semua.

2.2 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

2.2.1 Serapan Anggaran Program Tahun 2016

Alokasi pagu anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 360.838.691.000,- dengan komposisi Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 315.838.691.000,- (87,53%), dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 45.000.000.000,- (12,47%).

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S. 1969/AG/2016 tentang Pengesahan Revisi APBN-P TA 2016 lingkup Badan P2SDM Kementerian LHK, pagu anggaran Badan P2SDM mengalami pemotongan sebesar Rp. 15.147.146.000,- atau sebesar 4,20%, sehingga pagu Badan P2SDM menjadi Rp. 345.691.545.000,-, dengan komposisi RM sebesar Rp. 305.776.735.00,- (88,45%) dan PNBP sebesar Rp. 39.914.810.000,- (11,55%). Besaran rincian perubahan anggaran APBN-P masing-masing kegiatan tersebut tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12. Perubahan Pagu Anggaran APBN dan APBN-P Per Kegiatan Badan P2SDM Tahun 2016.

dalam ribuan rupiah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	
		APBN	APBN-P
	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	360.838.691	345.691.545
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM	66.628.000	65.697.772
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	146.565.000	143.413.100
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	77.453.691	71.768.547
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	18.428.000	16.928.076
5	Peningkatan Penyuluhan	20.699.000	18.547.053
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	31.065.000	29.336.997

Pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan, Pagu anggaran Badan P2SDM bertambah sebesar Rp. 2.370.000.000,- menjadi Rp. 348.061.545.000,-. Kenaikan tersebut akibat adanya penambahan pagu pada Satker Sekretariat Badan P2SDM akibat kekurangan anggaran untuk belanja gaji pegawai dari lintas program dan satker serta adanya tambahan dana hibah pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Anggaran tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan karena adanya Instruksi Presiden Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Besarnya anggaran yang harus dihemat oleh Badan P2SDM yaitu Rp. 13.624.030.000,- dengan rincian sebagaimana Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Pagu Anggaran dan Self Blocking Badan P2SDM Tahun 2016

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	
		APBN-P	Self Blocking
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		348.061.545.000	13.624.030.000
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM	65.529.772.000	1.347.770.000
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	143.177.100.000	5.808.640.000
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	72.278.547.000	0
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	16.341.076.000	2.258.320.000
5	Peningkatan Penyuluhan	18.247.053.000	1.500.000.000
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	32.487.997.000	2.709.300.000

Pagu Anggaran Badan P2SDM Tahun 2016 sebesar Rp. 348.061.545.000,- dengan realisasi s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 332.037.996.961,- atau sebesar 95,40% atau setara dengan 99,28% (jika menggunakan pagu anggaran setelah dikurangi *self blocking*). Adapun realisasi fisik sebesar 97,83%. Rincian capaian kinerja anggaran dan fisik pada setiap kegiatan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Per Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

Dalam ribuan rupiah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)
			Rp.	% APBN-P	% tanpa Self Blocking	
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		348.061.545	332.037.996	95,40	99,28	97,83
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM	65.529.772	64.177.526	97,94	99,99	100,00
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	143.177.100	136.457.192	95,31	99,34	98,90
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	72.278.547	71.019.805	98,26	98,26	99,28
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	16.341.076	14.024.395	85,82	99,59	99,99
5	Peningkatan Penyuluhan	18.247.053	16.717.165	91,62	99,82	91,78

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)
			Rp.	% APBN-P	% tanpa Self Blocking	
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	32.487.997	29.641.913	91,24	99,54	91,66

Berdasarkan realisasi keuangan per satker lingkup Badan P2SDM yang meliputi Sekretariat Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pusat Diklat SDM LHK dan Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, serta 7 Balai Diklat LHK dan 5 SMMKN Tahun 2016 tersaji pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Realisasi Keuangan Per Output Kegiatan Tahun 2016 pada Satker Pusat lingkup Badan P2SDM

Dalam ribuan rupiah

No	Satker	Pagu		Realisasi		
		APBN-P	Tanpa Self Blocking	Realisasi	%	% tanpa Self Blocking
	Badan P2SDM	348.061.545	334.437.515	332.037.996	95,40	99,28
1	Sekretariat Badan	32.487.997	29.778.697	29.641.913	91,24	99,54
2	Pusat Penyuluhan	18.247.053	16.747.053	16.717.165	91,62	99,82
3	Pusrenbang SDM	65.529.772	64.182.002	64.177.526	97,94	99,99
4	Pusdiklat SDM LHK	42.806.458	40.048.358	39.754.975	92,87	99,27
5	Puslatmas dan PGL	16.341.076	14.082.756	14.024.395	85,82	99,59
6	Balai Diklat LHK Bogor	16.458.723	15.943.093	15.896.379	96,58	99,71
7	Balai Diklat LHK P.Siantar	12.631.574	12.326.674	12.298.740	97,37	99,77
8	Balai Diklat LHK Samarinda	13.083.592	12.760.212	12.694.316	97,02	99,48
9	Balai Diklat LHK Makassar	16.503.594	15.575.204	15.405.010	93,34	98,91
10	Balai Diklat LHK Pekanbaru	13.718.584	13.506.454	13.465.544	98,16	99,70
11	Balai Diklat LHK Kadipaten	14.129.686	13.714.776	13.662.509	96,69	99,62
12	Balai Diklat LHK Kupang	15.077.021	14.725.821	14.510.929	96,25	98,54
13	SMKK N Manokwari	15.388.259	15.388.259	14.761.666	95,93	95,93
14	SMKK N Kadipaten	13.395.625	13.395.625	13.082.866	97,67	97,67
15	SMKK N Makassar	13.193.625	13.193.625	13.081.315	99,15	99,15
16	SMKK N Samarinda	15.634.281	15.634.281	15.533.147	99,35	99,35
17	SMKK N Pekanbaru	13.434.625	13.434.625	13.329.602	99,22	99,22

2.2.2 Serapan Anggaran dan Prognosis Tahun 2017

Alokasi pagu anggaran APBN TA. 2017 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp. 307.831.468.000,-. Rincian alokasi anggaran tersebut per masing-masing kegiatan pada satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Distribusi alokasi anggaran APBN per masing – masing satker lingkup BP2SDM

No.	Satuan Kerja	Pagu
A. Satuan Kerja Pusat		
1.	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	41.961.300.000
2.	Pusat Diklat SDM LHK	37.765.000.000
3.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	13.400.000.000
4.	Pusat Penyuluhan	8.450.000.000
5.	Sekretariat Badan P2SDM	29.757.568.000
B. UPT Balai Diklat LHK		
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pematangsiantar	12.622.800.000
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pekanbaru	13.332.800.000
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Bogor	13.540.000.000
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kadipaten	13.600.000.000
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Samarinda	11.552.800.000
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Makassar	15.416.000.000
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kupang	13.033.200.000
C. UPT SMK Kehutanan Negeri		
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru	16.600.000.000
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten	16.350.000.000
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda	15.200.000.000
4.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makasar	17.850.000.000
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari	17.400.000.000
Jumlah A + B + C		307.831.468.000

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017, Kementerian LHK mengalami penghematan sebesar Rp. 309.095.640.000,-. Menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, berdasarkan Surat Menteri LHK No. S.260/MENLHK/SETJEN/SET1/7/2017 tentang Usulan revisi APBN-P Kementerian LHK TA. 2017, Badan P2SDM mengalami penghematan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan penyesuaian belanja pegawai yang berkurang sebesar

Rp. 1.779.275.000,-. Pada bulan September, pagu BP2SDM bertambah karena mendapat hibah langsung di satker SMKKN Samarinda sebesar Rp. 333.385.000.000,- sehingga pagu Badan P2SDM sebesar Rp. 303.385.578.000,-. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, pagu APBN-P Badan P2SDM menjadi Rp. 303.385.578.000,-. Alokasi untuk masing-masing satuan kerja lingkup BP2SDM dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Alokasi anggaran APBN-P per masing – masing satker lingkup BP2SDM

No	Satker	Pagu
A. Satuan Kerja Pusat		
1.	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	41,886,300,000
2.	Pusat Diklat SDM LHK	36,832,266,000
3.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	13,139,285,000
4.	Pusat Penyuluhan	8,350,000,000
5.	Sekretariat Badan P2SDM	28,433,742,000
B. UPT Balai Diklat LHK		
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pematangsiantar	12,522,800,000
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pekanbaru	13,232,800,000
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Bogor	13,740,000,000
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kadipaten	13,500,000,000
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Samarinda	11,827,800,000
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Makassar	15,216,000,000
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kupang	12,671,200,000
C. UPT SMK Kehutanan Negeri		
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru	16,786,560,000
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten	16,010,000,000
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda	15,193,385,000
4.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makasar	17,188,440,000
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari	16,855,000,000
Jumlah A + B + C		303,385,578,000

Realisasi anggaran pada Badan P2SDM hingga awal Oktober 2017 telah terserap sebesar Rp. 223.884.500.605,- (73,80% pagu anggaran APBN-P Badan P2SDM). Capaian anggaran tersebut per satuan kerja lingkup Badan P2SDM s.d awal Oktober 2017 tercantum pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Capaian anggaran Badan P2SDM hingga 9 Oktober 2017

No.	Satuan Kerja	Pagu	s.d 9 Oktober 2017	
			Realisasi	%
A. UNIT KERJA PUSAT				
1	Sekretariat Badan	28.433.742.000	21.050.486.361	74,03%
2	Pusrenbang SDM	41.886.300.000	30.772.717.050	73,47%
3	Pusdiklat SDM LHK	36.832.266.000	27.828.825.613	75,56%
4	Puslatmas & PGL	13.139.285.000	9.749.709.795	74,20%
5	Pusat Penyuluhan	8.350.000.000	6.439.186.643	77,12%
B. BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
6	BD LHK Bogor	13.740.000.000	11.283.155.800	82,12%
7	BD LHK P.Siantar	12.522.800.000	9.229.963.616	73,71%
8	BD LHK Samarinda	11.827.800.000	9.317.202.675	78,77%
9	BD LHK Makassar	15.216.000.000	11.993.389.735	78,82%
10	BD LHK Pekanbaru	13.232.800.000	10.921.585.840	82,53%
11	BD LHK Kadipaten	13.500.000.000	11.025.165.519	81,67%
12	BD LHK Kupang	12.671.200.000	9.856.712.703	77,79%
C. SMK KEHUTANAN NEGERI				
13	SMKKN Manokwari	16.855.000.000	10.284.121.858	61,02%
14	SMKKN Kadipaten	16.010.000.000	11.026.826.517	68,87%
15	SMKKN Makassar	17.188.440.000	10.003.058.236	58,20%
16	SMKKN Samarinda	15.193.385.000	11.108.128.520	73,11%
17	SMKKN Pekanbaru	16.786.560.000	11.994.264.124	71,45%
JUMLAH A + B + C		303.385.578.000	223.884.500.605	73.80%

Pada tahun 2017, Badan P2SDM memiliki prognosis realisasi anggaran hingga bulan Desember 2017 sebesar Rp. 298.822.272.330,- (98,50% pagu APBN-P Badan P2SDM). Prognosis tersebut merupakan hitungan perkiraan anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan hingga Desember 2017. Setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM memiliki nilai prognosis berbeda. Secara terperinci prognosis setiap satker lingkup Badan P2SDM tercantum pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Prognosis satuan kerja lingkup Badan P2SDM hingga Desember 2017

No.	Satuan Kerja	Pagu	Prognosis s.d. Desember 2017	%
A. UNIT KERJA PUSAT				
1	Sekretariat Badan	28.433.742.000	28.182.992.000	99,12%
2	Pusrenbang SDM	41.886.300.000	41.844.413.700	99,90%
3	Pusdiklat SDM LHK	36.832.266.000	36.279.782.010	98,50%

No.	Satuan Kerja	Pagu	Prognosis s.d. Desember 2017	%
4	Puslatmas & PGL	13.139.285.000	13.021.031.435	99,10%
5	Pusat Penyuluhan	8.350.000.000	8.224.750.000	98,50%
B. BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
6	BD LHK Bogor	13.740.000.000	13.456.987.750	97,94%
7	BD LHK P.Siantar	12.522.800.000	12.357.747.357	98,68%
8	BD LHK Samarinda	11.827.800.000	11.632.800.000	98,35%
9	BD LHK Makassar	15.216.000.000	14.885.157.328	97,83%
10	BD LHK Pekanbaru	13.232.800.000	13.101.320.570	99,01%
11	BD LHK Kadipaten	13.500.000.000	13.493.937.000	99,96%
12	BD LHK Kupang	12.671.200.000	12.635.577.000	99,72%
C. SMK KEHUTANAN NEGERI				
13	SMKKN Manokwari	16.855.000.000	16.080.000.000	95,40%
14	SMKKN Kadipaten	16.010.000.000	15.755.000.000	98,41%
15	SMKKN Makassar	17.188.440.000	16.488.644.000	95,93%
16	SMKKN Samarinda	15.193.385.000	14.666.572.000	96,53%
17	SMKKN Pekanbaru	16.786.560.000	16.715.560.000	99,58%
JUMLAH A + B + C		303.385.578.000	298.822.272.330	98,50%



III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

3.1 Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2018

Pada Tahun 2018 terdapat 10 Prioritas Nasional yang menjadi fokus pembangunan secara nasional. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional. Dari 10 Prioritas Nasional tersebut, Badan P2SDM termasuk ke dalam 3 Prioritas Nasional yaitu Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Wilayah.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pendidikan, kegiatan Badan P2SDM yang menjadi Proyek Rincian K/L adalah Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan. Kegiatan ini berlokasi di 5 SMK Kehutanan Negeri di bawah Badan P2SDM. Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk lulusan siswa SMKKN menjadi cakap dalam berwirausaha atau memiliki jiwa *entrepreneurship*. Selain itu, proyek rincian K/L lain untuk mendukung PN Pendidikan ini adalah Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan Lainnya. KHDTK ini akan dikembangkan sarana dan prasarana nya agar siswa SMK dapat menggunakan KHDTK sebagai salah satu lokasi praktek. Lokasi pengembangan KHDTK adalah Kadipaten, Makassar, Samarinda, dan Pekanbaru. Lokasi tersebut dipilih karena lokasi KHDTK di Balai Diklat dekat dengan lokasi SMKKN.

Untuk mendukung Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung adalah dengan peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak 367 unit. Lokasi yang dipilih juga disesuaikan dengan lokasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang menjadi isu utama Tahun 2018. Strategi Badan P2SDM dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan wilayah kegiatan prioritas perdesaan adalah dengan meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal yang berada pada 7 provinsi.

3.2 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018

Nama Unit Organisasi	:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kode Program	:	029.08.10
Nama Program	:	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Sasaran Program	:	Meningkatnya daya saing SDM LHK
Program Nasional	Prioritas :	1. Pendidikan 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pembangunan Wilayah

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan sasaran program meningkatnya daya saing SDM LHK. Pada tahun 2018, terdapat 4 (empat) kegiatan yang termasuk ke dalam 3 Prioritas Nasional, dengan rincian seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Prioritas Nasional Badan P2SDM Tahun 2018

No.	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja
1. PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN		
Program Prioritas: Pendidikan Vokasi		
Kegiatan Prioritas: Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja		
Proyek Prioritas Nasional: Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja		
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan
Kegiatan Prioritas : Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas		
Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi		
2.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan Lainnya
2. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
Program Prioritas: Peningkatan Daya Saing UMKM dan Operasi		
Kegiatan Prioritas : Perluasan Akses Pembiayaan		
Proyek Prioritas Nasional : Peningkatan Modal Usaha bagi KUMKM dan Kelompok Usaha		
3.	Peningkatan Penyuluhan	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya

No.	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja
3. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH		
Program Prioritas Nasional : Pembangunan Perdesaan		
Kegiatan Prioritas : Pengelolaan SDA Desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan		
Proyek Prioritas Nasional : Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		
4.	Peningkatan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH

Sesuai rencana strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019, penyelenggaraan program pada Tahun 2018 ini juga dijabarkan melalui 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Sesuai dengan renstra tersebut pula terdapat 4 (empat) target indikator kinerja program yang dijabarkan melalui 17 indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Tabel 20 dan 21 berikut atau Secara lebih terperinci target kinerja kegiatan Badan P2SDM pada Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran dokumen Rencana Kerja ini.

Tabel 21. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2015-2019	Target 2018
Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	5.500 Unit KTH	377 Unit KTH
Jumlah Tenaga Bakti Rimawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, Dan SDM LHK Kompeten, 25.400 orang.	25.400 Orang	1.140 Orang
Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya, 57.640 orang.	57.640 Orang	3.744 Orang
Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya, 71.200 Orang, dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	71.200 Orang 5.000 Unit Sekolah/Kampus	4.975 orang 380 Unit Sekolah/Kampus

Tabel 22. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2018

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<p>Peningkatan Penyuluhan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i></p>	a) Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok Tani Desa-Desa Hutan dari Tingkatan Pemula ke Madya, 367 unit b) Jumlah unit Koperasi Kelompok Tani Hutan yang dibentuk, 10 unit c) Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 10 unit d) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping/ Penyuluh Handal Bagi KTH, 200 orang
<p>Perencanaan dan Pengembangan SDM Sasaran: <i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten</i></p>	a) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengelola KPH, 440 orang (<i>pembiayaan rekrutmen baru sebanyak 230 orang</i>) b) Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya, 700 orang
<p>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i></p>	a) Jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK Yang Meningkatkan Kapasitasnya, 2.679 Orang b) Jumlah SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa (S2 dan S3), 85 orang c) Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan danLainnya, 4 unit KHDTK d) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan yang Meningkatkan Kapasitasnya, 230 orang e) Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Hutan Meningkatkan Kapasitasnya, 300 orang
<p>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran: <i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i></p>	a) Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan, 450 orang
<p>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan</i></p>	a) Jumlah Kader Lingkungan Hidup yang Meningkatkan Kapasitasnya, 375 orang b) Jumlah Generasi Muda Lingkungan Hidup yang Meningkatkan Kapasitasnya, 4.100 orang c) Jumlah Sekolah/Kampus Yang Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup, 380 Unit Sekolah/Kampus d) Jumlah Anggota Saka Kalpataru Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup, 500 orang
<p>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sasaran: <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i></p>	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 83,00 (A) di Tahun 2016.

Alokasi pagu anggaran TA. 2018 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp. 325.914.960.000,- dengan rincian RM sebesar Rp. 272.079.316.000,-, PNPB Rp. 48.497.817.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 5.337.872.000,-. Rincian alokasi anggaran berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 23 dan distribusi alokasi anggaran per masing-masing kegiatan pada satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 23. Alokasi anggaran Badan P2SDM berdasarkan jenis belanja dan sumber dana (dalam ribuan rupiah).

Jenis Belanja			Sumber Dana			Jumlah
Belanja Pegawai	Belanja Barang		RM	PNBP	HLN	
	Operasional	Non-Operasional				
134.076.690 ^{*)}	29.554.947	162.283.323	272.079.316	48.497.817	5.337.827	325.914.960

*) termasuk Gaji Induk + uang makan, Tunjangan Kinerja (13 bulan) dan transitio

Tabel 24. Distribusi alokasi anggaran per masing – masing satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM (dalam ribuan rupiah)

No.	SATUAN KERJA	JUMLAH (Rp.)
A. Unit Kerja Pusat		
1	Setbadan P2SDM	45.725.437.000
2	Pusrenbang SDM	26.736.200.000
3	Pusluh	10.854.600.000
4	Puslatmas GLH	12.643.000.000
5	Pusdiklat LHK	39.763.232.000
B. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
6	BDLHK Pematangsiantar	11.488.000.000
7	BDLHK Pekanbaru	14.250.000.000
8	BDLHK Bogor	14.555.000.000
9	BDLHK Kadipaten	13.207.000.000
10	BDLHK Samarinda	12.571.000.000
11	BDLHK Makassar	14.888.973.000
12	BDLHK Kupang	11.935.000.000
C. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri		
13	SMKKN Pekanbaru	20.067.000.000
14	SMKKN Kadipaten	20.533.420.000
15	SMKKN Samarinda	17.462.348.000
16	SMKKN Makassar	18.865.000.000
17	SMKKN Manokwari	20.369.750.000
Total BP2SDM		325.914.960.000

IV. PENUTUP

Pada tahun 2018 terdapat 10 Prioritas Nasional yang menjadi fokus dalam pembangunan Indonesia. Sebagai “supporting system” terhadap Eselon I lain di KLHK, Badan P2SDM memiliki peran penting dalam membentuk SDM yang kompeten dan berkualitas, serta kegiatan yang dilaksanakan harus dapat mendukung keberhasilan Prioritas Nasional tersebut. Sesuai arahan Presiden terkait kebijakan Tahun 2018 mengenai prioritas nasional dan *money follow program*, setiap satker juga harus menerapkannya sehingga dapat mendukung kinerja kementerian/lembaga dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan program di Badan P2SDM harus didukung dengan adanya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian atau evaluasi kerjanya. Apabila antara perencanaan kegiatan dan penganggaran tidak terdapat sinkronisasi, maka kegiatan yang dilaksanakan pun tidak akan dapat berjalan dengan lancar, serta evaluasi yang dilakukan pun akan menjadi sulit. Oleh karena itu, melalui Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2018 ini setiap satker harus dapat menjadikannya sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2018.

Melalui kerja sama dari setiap elemen penyelenggara pembangunan, rencana kerja Badan P2SDM yang telah disusun ini dapat mendorong kinerja SDM yang lebih baik serta pula. Setiap ASN yang ada di lingkup Badan P2SDM juga harus dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.



V. LAMPIRAN

Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
I	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi da birokrasi pada unit Badan P2SDM			45.725.437								
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai 83,00 (A)		83,00	poin									
	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM				8.833.800	Jakarta							V
	<i>Tata Kelola di bagian program dan kerjasama</i>				2.244.161								
	<i>a. Pembinaan administrasi dan teknis perencanaan/program</i>				688.313								
	<i>b. Pembinaan administrasi dan teknis revisi anggaran</i>				694.483								
	<i>c. Pengembangan kerjasama teknis penyuluhan Badan P2SDM</i>				861.365								
	<i>Tata Kelola di bagian keuangan dan umum</i>				2.137.969								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	a. Pembinaan administrasi umum				350.660								
	b. Pembinaan administrasi keuangan				875.327								
	c. Pembinaan administrasi perlengkapan				911.982								
	Tata Kelola di bagian informasi, publikasi dan evaluasi				2.228.657								
	a. Pengembangan data dan informasi P2SDM				706.015								
	b. Pengembangan dokumentasi dan publikasi				707.390								
	c. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan				815.252								
	Tata Kelola di bagian kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana				2.223.013								
	a. Pembinaan administrasi kepegawaian				742.118								
	b. Pembinaan jabatan fungsional				743.098								
	c. NSPK Peraturan Perundangan P2SDM				737.797								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	36.891.637								
	Tanpa Sub Output												
	a. Gaji dan Tunjangan				33.986.690								
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				2.904.947								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
II	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten			26.736.200								
1.	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH		440*	orang									
	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH				18.640.000	36 KPHL dan 63 KPHP							V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Perencanaan Bidang SDM Non Aparatur</i>				17.593.750								
	<i>b. Perencanaan Bidang SDM Aparatur</i>				1.046.250								
2.	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya		700	orang									
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya				6.896.200	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Kep. Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Jateng, DKI Jakarta, DIY, Jabar, Jatim, Bali, NTB, NTT, Banten, Kalsel (Uji Kompetensi dilaksanakan di Ibukota Provinsi)							V

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	a. Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK Pendukung KPH				3.696.200								
	b. Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK				1.700.000								
	c. Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Pelaporan				1.500.000								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	1.200.000								
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				1.200.000								
III	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan			124.541.205								
1.	Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya		2.679	orang									
	Jumlah SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya				25.763.205	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	<i>a. Diklat Teknis</i>				10.540.000								
	<i>b. Diklat Fungsional</i>				2.401.605								
	<i>c. Diklat Administrasi</i>				1.145.439								
	<i>d. Diklat Kepemimpinan</i>				3.672.078								
	<i>e. Pendukung Kediklatan</i>				8.004.083								
2.	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)		85	orang									
	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)				4.500.000	Pusdiklat SDM LHK							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Pendidikan program S2 dalam negeri</i>				1.634.000								
	<i>b. Pendidikan program S3 dalam negeri</i>				2.007.500								
	<i>c. Pengelolaan pendidikan lanjutan</i>				858.500								
3.	Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan		7	unit									
	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan lainnya (Prioritas Nasional)		4	unit	4.500.000	BDLHK Pekanbaru, BDLHK Kadipaten, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda,	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	Pendidikan Vokasi	Pendidikan				V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				4.500.000								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan (Non Prioritas Nasional)		7	unit	1.460.000	BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Perencanaan</i>				290.000								
	<i>b. Pengembangan dan pemanfaatan</i>				500.000								
	<i>c. Pemeliharaan</i>				230.000								
	<i>d. Perlindungan, pengamanan dan penyuluhan</i>				190.000								
	<i>e. Administrasi dan pelaporan</i>				250.000								
4.	Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkatkan kapasitasnya		230	orang									
	Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkatkan kapasitasnya				950.000	BDLHK Pekanbaru, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda,							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Diklat Bakti Rimbawan</i>				950.000								
5.	Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya		300	orang									

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi	
	Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya				1.400.000	BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang								
	<i>Tanpa Sub Output</i>													
	<i>a. Diklat teknis tenaga pendamping KTH</i>				1.400.000									
	Layanan Internal (Overhead)		1	layanan	168.000	Pusdiklat SDM LHK								
	<i>Tanpa Sub Output</i>													
	<i>a. Peralatan dan mesin</i>				168.000									
	Layanan Perkantoran		1	layanan	85.800.000	Pusat dan 7 BDLHK								
	<i>Tanpa Sub Output</i>													
	<i>a. Gaji dan Tunjangan</i>				70.800.000									
	<i>b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>				15.000.000									
IV	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan			99.297.518							Anggaran Pendidikan		
1.	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan		450	orang										
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan (Prioritas Nasional)				60.000.000	SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Makassar, SMKKN Samarinda, SMKKN Manokwari	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Pendidikan Vokasi	Pendidikan					

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan				53.524.820								
	b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008				218.100								
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan				5.655.980								
	d. Publikasi pendidikan				523.850								
	e. Kerjasama pendidikan				77.250								
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia (Non Prioritas Nasional)				7.350.518	SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Makassar, SMKKN Samarinda, SMKKN Manokwari							V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan				98.902								
	b. Dokumen perencanaan dan pembinaan				7.251.616								
	Layanan Perkantoran		1	Layanan	31.947.000	5 SMKKN							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	a. Gaji dan Tunjangan				24.797.000								
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				7.150.000								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
V	Penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup			18.760.000								
1.	Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya		375	orang									
	Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya				900.000	Sumatera Selatan, Lampung, Banten							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pelatihan kader dan ekspose/pameran generasi lingkungan hidup</i>				79.190								
	<i>b. Pelatihan kader lingkungan hidup</i>				667.890								
	<i>c. Pelaksanaan ekspose/pameran generasi lingkungan hidup</i>				152.920								
2.	Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya		4.100	orang									
	Jumlah generasi muda lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya				8.667.000	DIY, Riau, NTT, Babel, Sumsel, Kaltim, Lampung, Bengkulu, Sumbar, Jambi, Kalteng, dan 7 BDLHK (Kadipaten, Pekanbaru, Samarinda, Makassar, Bogor, Pematang Siantar, Kupang)							

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pelatihan masyarakat dan generasi muda lingkungan hidup</i>				103.500								
	<i>b. Pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup</i>				588.080								
	<i>c. Pelatihan masyarakat bidang kehutanan</i>				7.443.500								
	<i>d. Pelaksanaan tata kelola bagian program dan umum</i>				531.920								
3.	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya		380	unit									
	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup				1.400.000	34 Provinsi							V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Pembinaan tim penilai dan tim Pembina adiwiyata</i>				614.480								
	<i>b. Penilaian/evaluasi sekolah adiwiyata</i>				643.920								
	<i>c. Pemberian penghargaan adiwiyata</i>				641.600								
4.	Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH		500	orang									

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup				700.000	Jawa Tengah dan Samarinda							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Pelatihan saka kalpataru dan saka waabakti</i>				700.000								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	6.593.000								
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Gaji dan Tunjangan</i>				4.493.000								
	<i>b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>				2.100.000								
VI	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat			10.854.600								
1.	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya		367	unit									
	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa huta dari tingkatan pemula ke madya (Prioritas Nasional)				5.500.000	33 Provinsi (selain DKI Jakarta)	Perluasan Akses Pembiayaan	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Operasi	Penanggulangan Kemiskinan				V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Fasilitasi kegiatan peningkatan kelas KTH</i>				5.500.000								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribuan Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa huta dari tingkatan pemula ke madya (Non Prioritas Nasional)				1.865.900	Pusat							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Peningkatan kelas KTH dari pemula ke madya</i>				750.000								
	<i>b. Pengembangan metode, materi, dan sarpras penyuluhan</i>				585.460								
	<i>c. Perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluhan</i>				530.440								
2.	Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk		10	unit									
	Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk				462.100	Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, Bali, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah							V
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi KTH</i>				462.100								
3.	Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS)		10	unit									

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS)				672.000	Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Pembentukan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS)</i>				672.000								
4.	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan		200	orang		Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan							
	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/peyuluh handal bagi KTH (Prioritas Nasional)				1.004.600		Pengelolaan SDA Desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan Wilayah				
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Pembinaan teknis peyuluh</i>				1.004.600								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/peyuluh handal bagi KTH (Non Prioritas Nasional)				150.000	Pusat							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluh handal bagi KTH (Non Prioritas Nasional)</i>				150.000								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	1.200.000	Pusat							
	<i>Tanpa Sub Output</i>												
	<i>a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>				1.200.000								

Keterangan : * = Pembiayaan pada Tahun 2018 sebanyak 440 orang yang terdiri dari 230 orang rekrutmen baru dan 210 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan tahun ke-II (rekrutmen tahun 2017)

PUSTAKA

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
2. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;
3. Laporan Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016;
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan P2SDM Bulan September Tahun 2017.





**Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Gedung Manggala Wanabakti Blok. I Lantai 14
Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Email: setbp2sdm@gmail.com /
badanppsdk@gmail.com
Telp. (021) 5730131, Fax. (021) 5730131**